

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA (Kepemimpinan Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan Soesilo Bambang Yudhoyono)

Agus Nilmada Azmi

FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

Foreign policymaking is always strongly related to international politics and domestic situations. These two aspects become determinant factors for the making of foreign policy in a country. Based on this research, it should be asked whether Indonesia's foreign policy, Bebas Aktif (free and active). Reflecting on the emergence of the politic of Bebas Aktif that has been used as the guideline of Indonesian foreign policy, significantly during the cold war, and the changes in international system as well as national politics, this article will analyze the performance of Indonesian foreign policy after the fall of Soeharto's regime.

Keywords: *Foreign Policy, International Politics, Soeharto*

Abstrak

Pembuatan kebijakan luar negeri selalu terkait erat dengan politik internasional dan situasi domestik. Kedua aspek tersebut menjadi faktor penentu bagi pembuatan politik luar negeri suatu negara. Berdasarkan penelitian ini, perlu dipertanyakan apakah politik luar negeri Indonesia Bebas Aktif? Berkaca pada munculnya politik Bebas Aktif yang selama ini menjadi pedoman politik luar negeri Indonesia, terutama pada masa perang dingin, dan perubahan sistem internasional maupun politik nasional, artikel ini akan menganalisis kinerja politik luar negeri Indonesia. setelah jatuhnya rezim Soeharto.

Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri, Politik Internasional, Soeharto

Copyright (c) 2023 Agus Nilmada Azmi.

✉ Corresponding author : Agus Nilmada Azmi

Email Address : agus.nilmada.azmi@uinjkt.ac.id

PENDAHULUAN

Pembahasan demokratisasi menekankan pada faktor domestik yang mendukung atau menghambat proses demokratisasi. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa argumen, antara lain: aktor politik pada tahapan demokratisasi selalu berfokus pada konsolidasi kekuatan. Sebab itu, tahapan politik dalam waktu transisi seringkali bersifat "inward looking". Lebih lanjut, besarnya tren untuk pengkajian proses demokratisasi dalam politik domestik bersumber dari asumsi yang fokus pada aktor politik domestik yang memutuskan tindakan politik yang akan dilaksanakan.

External Factor juga berkontribusi pada ketidakjelasan yang meliputi setiap tahapan politik, menjadikan negara yang sedang melalui demokratisasi menjadi rentan. Pengaruh eksternal dari tahapan demokratisasi dapat berlangsung dalam berbagai hal: *contagion*, *control*, *consent* dan *conditionality*. Demokratisasi di suatu daerah menyebabkan arus demokratisasi pada negara lainnya, hal tersebut terjadinya *Contagion*. Tahapan demokratisasi Eropa Timur pasca berakhirnya Perang Dingin dan arus demokratisasi negara Amerika Latin medio 1970-an menjadi fenomena yang penting.

Sistem kontrol muncul saat selain negara mengupayakan untuk menegakkan demokrasi pada negara tersebut. Contohnya, Doktrin Truman tahun 1947 mewajibkan Yunani melaksanakan persyaratan tertentu untuk memperoleh status "demokratis", dengan demikian memenuhi syarat untuk bantuan anti-komunis AS. Sedangkan *consent*, mendorong harapan demokrasi datang dari internal negara tersebut, dikarenakan warga negara memandang sistem politik yang ideal, demokrasi dewasa lainnya, juga menjadi target oleh negara. Maknanya, dampak internasional adalah motivator yang kuat bagi warga negara. Kasus yang selalu dikutip adalah penyatuan Jerman Timur dan Barat. Dimensi internasional yang keempat dalam tahapan demokratisasi yaitu *conditionality*, merupakan aktifitas yang diimplementasikan oleh organisasi internasional yang memberikan syarat-syarat spesifik yang harus dilengkapi oleh negara penerima.

Kebijakan luar negeri pada masa krisis cenderung kurang fokus pada kebijakan luar negeri karena upaya pemulihan dari situasi dalam negeri. Di masa krisis, pengaruh Indonesia di Asia Tenggara tidak tampak. Sebab itu, posisi ini diambil alih oleh Thailand atau Singapura. Pelaksanaan pemilu yang damai tahun 2004 dan 2009 juga dilakukan Indonesia untuk menarik perhatian internasional.

Kebijakan pemerintah kabinet koalisi Indonesia (2004-2009) berkomitmen terhadap kepentingan nasional yang termaktub dalam UUD 1945 yaitu "melindungi segenap NKRI dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kemaslahatan umum, dan ikut serta mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Dalam rangka menjamin terwujudnya tujuan nasional, Kemlu memfokuskan pada kerjasama diplomasi dengan sederet negara konsentris di dunia, antara lain: Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Lingkaran berikutnya yaitu ASEAN+3 (China, Korea Selatan dan Jepang), dan berikutnya Indonesia pun menjalin interaksi yang erat dengan AS dan UE (merupakan mitra ekonomi Indonesia). Indonesia juga menganggap urgennya kerja sama

dengan negara-negara berkembang yang berpikiran sama. Hal ini yang mendorong Indonesia aktif bergabung dengan Gerakan Non Blok (GNB), Organisasi Konferensi Islam (OKI), Kelompok 77 (G-77) dan Kelompok 15 (G-15).

KERANGKA KONSEPTUAL

Politik luar negeri suatu negara bukanlah hal yang mampu dirumuskan secara serampangan tanpa didukung oleh landasan dan prinsip-prinsip yang berguna untuk memperkuat eksistensi dan kekuatan politik luar negeri tersebut. Ada tiga landasan yang menyusun politik luar negeri Indonesia (disebut dengan politik luar negeri bebas aktif), antara lain: Landasan Idiil politik Luar Negeri Indonesia, Pancasila merupakan landasan idiil dari politik luar negeri Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila yang dijadikan pedoman hidup berbangsa dan bernegara merupakan sesuatu yang dijadikan dasar dan penyesuaian dalam setiap pelaksanaan politik luar negeri.

Landasan Konstitusional, landasan konstitusional dari politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan berbagai pasal yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara ini menjadi garis besar bagi perumusan politik luar negeri Indonesia. Kepentingan nasional Indonesia haruslah mendapatkan posisi yang jelas dalam politik luar negeri. Terakhir yakni Landasan Operasional, berbeda dengan landasan idiil dan konstitusional yang dijadikan patokan dasar dan tidak dapat berubah, landasan operasional berganti dan berkembang sesuai dengan jalannya berbagai masa pemerintahan yang mengusung kepentingan nasional yang berbeda.

Landasan operasional Indonesia banyak dinyatakan melalui berbagai maklumat yang dinyatakan presiden Soekarno seperti politik damai dan hidup berdampingan secara damai, politik tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain, serta politik berdasarkan piagam PBB. Pada tahun 1950 dan seterusnya, landasan operasional ini mengalami perkembangan dan perluasan makna.

Pada masa orde baru, landasan operasional kemudian diwujudkan dalam tingkat formal pada masa orde baru seperti ketetapan MPRS dan ketetapan MPR dan dijabarkan dalam Pola Umum pembangunan Jangka Panjang.

Berubahnya kepentingan nasional selama pergantian pemerintahan tertuang dalam pergantian kepentingan luar negeri. Semboyan perjuangan yang diusung Soekarno digantikan dengan upaya pembangunan ekonomi di masa orde baru. Begitu pula setelah masa reformasi, rekonseptualisasi politik luar negeri juga termasuk dalam agenda reformasi yang bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kondisi politik, ekonomi serta berbagai aspek lainnya.

Politik luar negeri Indonesia yang tidak terikat pada pihak manapun serta bebas menjalin hubungan dengan berbagai pihak selama itu sesuai dengan landasan idiil mulai disebut politik bebas aktif. Adanya konsep politik seperti ini muncul diantaranya adalah karena timbulnya perang dingin yang membagi dunia menjadi dua kubu barat dan timur pada saat itu. Perumusan politik bebas aktif bukanlah

sebuah doktrin yang statis, politik bebas aktif memiliki kemampuan untuk berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Secara implementatif, terdapat beberapa sumber primer yang menjadi input dalam merumuskan kebijakan luar negeri, yang menurut Rossenau antara lain: *Systemic source*, adalah sumber dari luar negara. Ini menggambarkan hubungan antara negara-negara *big-power*, pola aliansi yang dibentuk oleh negara tersebut, serta faktor situasional eksternal yang mungkin muncul dalam bentuk area masalah atau krisis. Struktur hubungan kekuatan utama mengacu pada jumlah dan distribusi kapasitas kekuatan utama yang berpartisipasi dalam struktur hubungan internasional. Sedangkan, yang dimaksud dengan situasional eksternal adalah dorongan yang bermula dari situasi internasional saat ini.

Societal Source, adalah yang berasal dari internal. Hal ini meliputi perubahan budaya dan historis, perkembangan ekonomi, struktur sosial, dan pandangan masyarakat. Budaya dan histori meliputi norma, tradisi, pengalaman masa lalu dan nilai yang menjadi dasar interaksi antar anggota masyarakat. Pembangunan ekonomi meliputi ketangguhan bangsa untuk mencapai kemakmuran. Hal ini merupakan dasar kepentingan nasional vis-a-vis dengan negara lain. Sedangkan *social structure* mencakup SDM yang dimiliki suatu negara atau potensi konflik dan dinamika internal pada public/masyarakat. *Public Opinion* juga bsia merupaan faktor dimana peneliti akan memandang perubahan sentiment publik terhadap yang lain.

Sedangkan *governmental sources*, adalah yang menjabarkan mengenai pertanggungjawaban struktur dan politik pada pemerintahan. Akuntabilitas politik seperti kompetisi partai, pemilu dan tingkat fleksibilitas pembuat kebijakan terhadap keadaan eksternal. Dari perspektif struktur *leadership* berbagai kelompok dan individu yang termasuk dalam pemerintahan.

Terakhir, *idiosyncratic sources*, adalah sumber internal yang melihat nilai, pengalaman, bakat, dan kepribadian elit politik yang membentuk persepsi, perhitungan, dan perilaku mereka terkait kebijakan luar negeri. Termasuk juga pandangan elit politik terhadap keadaan alamiah kancah internasional dan tujuan nasional yang ingin dicapai.

Rosenau juga menjelaskan beberapa ketentuan yang mengatur proses pembentukan polugri yang berasal dari proses idiosinkratik, yaitu: Experience, Leadership Style dan Personality.

Mohtar Mas'oeed dalam bukunya juga menjelaskan factor idiosyncratic yang mengutip dari Patrick Morgan dinyatakan bahwa individu merupakan peringkat analisis yang penting dalam melihat proses kebijakan luar negeri itu dibuat, selain tingkat analisis sistem internasional, negara-bangsa, kelompok negara-bangsa dan tingkat analisis kelompok individu. Dengan melihat pada fenomena hubungan internasional sebagai hubungan perilaku antar individu.

PEMBAHASAN

Habibie

Indonesia yang sedang mengarah menuju demokrasi yang lebih baik melalui dua aspek: dari luar ke dalam dan dari dalam ke luar. Sebagai contoh, persyaratan yang diberlakukan oleh Dana Moneter Internasional untuk bantuan keuangan selama krisis ekonomi sampai batas tertentu secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses demokratisasi.

Pada konteks dari dalam ke luar, kebijakan luar negeri Indonesia saat tahun 1998 (Orde baru jatuh) mustahil untuk dipisahkan dari pergeseran politik yang masif setelah jatuhnya dominasi yang otoriter. Habibie, yang melanjutkan Suharto, merupakan contoh yang baik dari keterkaitan antara tahapan demokratisasi dan politik luar negeri suatu perubahan pemerintahan.

Pada awal Habibie menjabat, sebenarnya menghadapi persoalan legitimasi yang cukup berat. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden RI ke-3 menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Meskipun pemerintahan Habibie dapat menyelesaikan dua Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan perlindungan HAM, UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat dan No. 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965. Habibie pun sukses mendorong ratifikasi pada masalah hak pekerja (empat konvensi internasional). Begitu juga pengesahan Komnas Perempuan diimplementasikan pada periode Habibie.

Respon positif terhadap beberapa kebijakan hak asasi manusia menarik perhatian internasional, Habibie sukses mendapatkan kepercayaan yang cukup besar dari masyarakat internasional untuk menutupi lemahnya legitimasi di dalam negeri. Interaksi Habibie dengan IMF menjadi contoh yang elegan. IMF yang sebelumnya meminta Suharto untuk menunda proyek pesawat Habibie pada Januari 1998, Namun ketika Habibie menjabat, IMF dan Bank Dunia memberikan kepercayaan untuk melanjutkan proyek tersebut. IMF dan Bank Dunia mengalokasikan bantuan sebesar \$43 miliar untuk pendampingan krisis ekonomi dan bahkan memberikan bantuan tambahan sebesar \$14 miliar.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun legitimasi domestik tidak kokoh, namun telah mendapatkan dukungan internasional melalui beberapa kebijakan dan menciptakan citra positif di dunia internasional, yang akhirnya memberikan kontribusi positif bagi Habibie di masa transisi demokrasi.

Habibie juga memberikan contoh yang penting, di sisi lain, kebijakan luar negeri pun mempunyai implikasi negatif untuk keberlangsungan kepemimpinan transisi. Kebijakan Habibie tentang *East Timor* menunjukkan fakta tersebut dengan jelas. Pada Juni 1998, Habibie membuat pernyataan tentang provinsi *East Timor*, di mana ia mengupayakan otonomi yang luas bagi *East Timor*. Habibie membuat kebijakan yang radikal pada akhir 1998, dengan mengumumkan bahwa Indonesia menawarkan pilihan referendum pada penyelesaian *East Timor*.

Opsi keputusan radikal ini adalah hasil dari pesan yang dikirim ke Habibie oleh PM Australia John Howard pada Desember 1998. Namun Australia menyatakan bahwa pesan tersebut untuk mendorong Indonesia agar mengakui

hak rakyat Timor Leste atas penentuan nasib sendiri. Australia, juga mengusulkan hal yang sama kepada Kaledonia Baru, yang melaksanakan referendum beberapa tahun pasca memperoleh pemerintahan sendiri. Oleh sebab itu, sikap pilihan dari opsi otonomi luas ke referendum merupakan pilihan Habibie.

Terjadinya aksi kekerasan sesudah dan sebelum referendum, memojokkan pemerintahan Habibie. Kepercayaan domestik semakin berkurang karena sejumlah alasan, antara lain: Habibie dipersepsikan tidak memiliki hak konstitusional dalam rangka menggelar referendum di *East Timor* karena diasumsikan sebagai presiden peralihan. Begitu juga pada sisi keputusan Habibie tentang *East Timor* mengurangi saling kepercayaan antara Habibie dan Wiranto, Panglima Angkatan Darat Indonesia.

Di dunia internasional, Habibie dianggap gagal mengendalikan TNI yang dalam penjelasannya pro terhadap langkah Habibie untuk mengusulkan referendum, tetapi faktanya "lebih condong" kepada milisi pro-integrasi yang berakibat pada kekerasan pasca-referendum di *East Timor*.

Era/Periode	Faktor-faktor yang mempengaruhi			Pelaksanaan POLUGRI
	Kondisi Domestik, Politik dan Hukum	Kemampuan Ekonomi	Lingkungan Internasional	
BJ. Habibie	<ul style="list-style-type: none"> - Dinamika politik pasca reformasi - Konflik Timor-timur yang semakin memuncak - potensi disintegrasi, rasialisme, fanatisme keagamaan semakin meningkat - Adanya Inpres khusus untuk menyelesaikan praktek KKN Orde Baru, setelah gagalnya tim independen untuk mengkaji kekayaan Soeharto. - Melemahnya penegakan hukum dan aturan - Mengembangnya proses hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Kekuatan ekonomi melemah (produksi stagnan, suku bunga tinggi, cadangan devisa menipis, dsb.) 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pengaruh AS, pinjaman luar negeri (IMF) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecondongan ke Barat terutama Jerman - Lepasnya <i>East Timor</i> dari Indonesia - Mulai memanasnya hubungan Australia - RI

Era/Periode	Faktor-faktor yang mempengaruhi			Pelaksanaan POLUGRI
	Kondisi Domestik, Politik dan Hukum	Kemampuan Ekonomi	Lingkungan Internasional	
	atas berbagai kasus korupsi - Pemilu 1999 - Keterbukaan pers			

Abdurrahman Wahid

Jika di bawah Habibie ada hubungan interdependen antara pemerintahan Habibie dengan Tentara Nasional Indonesia, di bawah Abdurrahman Wahid ada hubungan saling ketergantungan antara upaya Presiden Wahid untuk memaksakan kontrol sipil pada militer. yang sifatnya subjektif.

Fokus Abdurrahman Wahid adalah *East Timor*. Sebuah panitia yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa memandang bahwa aksi kekerasan di *East Timor* pasca referendum 1999 diatur terstruktur. Panitia mengidentifikasi bahwa milisi pro-integrasi dan TNI dinyatakan pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan di *East Timor*.

Pengadilan Internasional direkomendasikan oleh Sekjen PBB untuk dibentuk dalam rangka mengadili para pejabat TNI yang dianggap bertanggung jawab, (juga Wiranto). Pun KPP HAM yang didirikan oleh Abdurrahman Wahid untuk menginvestigasi kejadian pasca referendum di *East Timor* juga merelease temuannya bahwa milisi dan TNI telah melanggar HAM berat di *East Timor* dan mengusulkan agar Kejaksaan melakukan penyelidikan Tentara Nasional Indonesia, termasuk Wiranto.

Menanggapi laporan itu, Abdurrahman Wahid mengatakan di Forum Ekonomi Dunia di Davos bahwa dia akan meminta Wiranto mundur sebagai Menko politik dan keamanan di kabinet. Wiranto mengatakan menolak mengundurkan diri dari kabinet, yang kemudian memicu anggapan potensi kudeta oleh Tentara Nasional Indonesia.

Persepsi ini muncul setelah Dubes AS untuk PBB, R Holbrooke, menyatakan keprihatinannya kepada pemerintah AS bahwa TNI tidak mensupport penyelidikan kekerasan di Timor Timur dan bahkan berpotensi untuk mengambil alih kekuasaan. Untuk menepis kecurigaan itu, para kepala staf semua angkatan mengatakan TNI tidak punya rencana menggulingkan pemerintahan Abdurrahman Wahid. Bahkan Mayjen Ryamizad Ryakudu, Panglima Kodam Jakarta saat itu, mengatakan TNI tetap setia kepada Panglima Besar Abdurrahman Wahid. Bahkan beliau memberikan pernyataan:

“TNI could have toppled the government of former President Habibie over the East Timor issue. We were able to stage a coup at that time out of our deep sorrow that the president wanted to let go of East Timor at the expense of our sacrifice to keep the territory of Indonesia for years”

Mundurinya Wiranto didukung penuh oleh legistalif (MPR dan DPR). Abdurrahman Wahid telah menggunakan kredibilitasnya internasionalnya sebagai figur pro-demokrasi untuk memperoleh dukungan atas keputusannya tentang

TNI serta penyelesaian “kasus separatis” yang melibatkan TNI. Pada konferensi pers di istana presiden pasca pertemuan dengan Abdurrahman Wahid, Sekjen PBB mengatakan, "Keputusan (tentang Wiranto) membuktikan bahwa Indonesia telah memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman di Timor Timur dimintai pertanggungjawaban.

Abdurrahman Wahid telah berulang kali mengangkat masalah dalam negeri dalam pertemuan dengan setiap kepala negara yang dia kunjungi selama setiap perjalanannya yang luas selama masa jabatannya yang singkat. Ini termasuk, selain Timor Timur, keutuhan wilayah Indonesia (seperti dalam kasus Aceh) dan peningkatan ekonomi.

Era/Periode	Faktor-faktor yang mempengaruhi			Pelaksanaan POLUGRI
	Kondisi Domestik, Politik dan Hukum	Kemampuan Ekonomi	Lingkungan Internasional	
Abdurrahman Wahid	<ul style="list-style-type: none"> - Dinamika politik pasca reformasi - Meningkatnya politik Islam - Menguatnya konflik lokal dan penanganan yang terkesan lambat - Menguatnya keresahan masyarakat dengan kasus-kasus bom - Persaingan antara Presiden dan DPR - Buloggate dan Bruneigate - Penegakan supremasi hukum dengan tidak melakukan intervensi pada peradilan - Meningkatnya pluralisme - Pembubaran Instansi Penerangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kekuatan ekonomi belum kuat - Proteksi penuh pada koperasi untuk memperkuat level bawah - Tahapan dan pernyataan yang seringkali kontroversial yang menyebabkan keadaan pasar tidak positif 	<ul style="list-style-type: none"> - Eksplorasi opsi hutang, usaha pengurangan ketergantungan pada lembaga asing. - Opsi hubungan ke Israel - ASEAN menurun 	<ul style="list-style-type: none"> - Polugri yang lebih “assertive” melalui komunikasi ke negara Asia dan Timteng - Opsi pendirian poros India-Indonesia - China

Era/Periode	Faktor-faktor yang mempengaruhi			Pelaksanaan POLUGRI
	Kondisi Domestik, Politik dan Hukum	Kemampuan Ekonomi	Lingkungan Internasional	
	- Dinamika sipil-militer			

Megawati

Megawati telah banyak melakukan kunjungan ke luar negeri diantaranya melawat ke beberapa negara di Asia, Amerika, Eropa dan menyampaikan pandangan di Majelis Umum PBB. Megawati menuai kecaman dalam kunjungannya, terkait frekuensi maupun isi kunjungan tersebut. Di antaranya adalah hasil kunjungan Megawati ke Moskow, yakni sengketa pembelian jet tempur dan helikopter Sukhoi dari Rusia.

Selain berbagai kunjungan dinas tersebut, politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Megawati dipengaruhi oleh berbagai peristiwa dalam dan luar negeri. Serangan teroris di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, Bom Bali pada tahun 2002 dan kejadian bom di hotel "JW Marriott" Jakarta pada 2003, serangan pimpinan AS dan Inggris ke Irak, dan aktifitas militer di Aceh melawan GAM adalah beberapa di antaranya. dari contoh-contoh yang mencirikan variabel dinamis internal dan eksternal. Indonesia.

Variabel-variabel ini menimbulkan masalah turunan yang kompleks. Misalnya, di satu hal, pemberantasan terorisme menjadikan Indonesia terbuka untuk melakukan kerjasama. Di sisi lain, kejadian ini juga menjadi fenomena dalam proteksi kebebasan sipil dalam proses demokrasi, dan pada saat yang sama muncul keraguan bahwasanya negara akan mempunyai kesempatan dalam memulihkan prinsip kebijakan keamanan di internal.

Tidak diragukan jika dikatakan diplomasi Indonesia meningkat di bawah Megawati. Implementasi diplomasi pada era Megawati didukung kembali oleh elit dan substansi yang memadai. Pada era Megawati, Kemlu, menjadi garda depan diplomasi Indonesia, direstrukturisasi dengan tujuan merekatkan aspek internasional dan domestik dalam mengatur diplomasi. Artinya, kementerian mengetahui bahwa diplomasi tidak lagi hanya sebagai proyeksi kepentingan Indonesia ke luar, namun juga kemampuan mengintegrasikan dinamika dari luar ke internal negara.

Mengingat pesatnya perubahan global, khususnya pasca 11 September 2001, pelaksanaan restrukturisasi tepat waktu. Perubahan yang akseleratif ini menjadikan setiap negara untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang update dan mengelola arah perubahan yang terjadi.

Periode	Faktor-faktor yang mempengaruhi			Pelaksanaan POLUGRI
	Kondisi Domestik, Politik dan Hukum	Kemampuan Ekonomi	Lingkungan Internasional	
Megawati (2001-2004)	- Konflik Lokal - isu-isu terorisme	- awal pemerintahan, ekonomi	- Dampak peristiwa 11 September 2001	- Polugri kembali bergeser ke Barat/Kanan

Periode	Faktor-faktor yang mempengaruhi			Pelaksanaan POLUGRI
	Kondisi Domestik, Politik dan Hukum	Kemampuan Ekonomi	Lingkungan Internasional	
	<ul style="list-style-type: none"> - lemahnya penanganan kasus TKI - kasus Buloggate II - penegakan supremasi hukum yang bellum tegas 	<ul style="list-style-type: none"> mulai menguat - LOI IMF selesai pada akhir 2003 sesuai TAP MPR nomor VI 2002 - masih adanya Post Program Monitoring (PPM) oleh IMF karena Indonesia mempunyai hutang sekitar 300% dari kuota untuk Indonesia. Monitoring dilakukan dua kali dalam setahun 	<ul style="list-style-type: none"> - menguatnya konflik AS - terorisme - bom bali oleh teroris mengakibatkan Indonesia dicap sebagai sarang teroris 	<ul style="list-style-type: none"> - menguatnya hubungan dengan ASEAN

Soesilo Bambang Yudhoyono

SBY mencari bermacam opsi yang bisa mengurangi beban kehidupan masyarakat. Diantaranya, delegasi Indonesia di luar negeri diinstruksikan untuk kreatif dalam mendapatkan peluang ekonomi dan menawarkan peluang ekonomi di Indonesia. Kegiatan delegasi Indonesia di luar negeri harus dilekatkan dengan masalah ekonomi yang diharapkan dapat mempercepat ekonomi nasional.

Hal ini menuntut pemerintah SBY bekerja keras mengubah paradigma para diplomat. Ketika warga menghadapi hukum, kekerasan, atau berbagai kesulitan, perwakilan Indoensia harus merespons secara agresif untuk melindungi warganya. Di sisi lain, mereka juga harus aktif dalam kampanye anti korupsi, kasus penyelundupan serta kejahatan peredaran narkoba. Paradigma sikap para perwakilan Indonesia perlu bergeser ke pelayanan, dan dari persoalan etiket ke persoalan potensi ekonomi.

Pada forum-forum resmi pun, apa yang sedang terjadi Indonesia harus diungkapkan. Misalnya, kegagalan untuk menghormati hak asasi manusia tidak dapat dijelaskan dengan keengganan pemerintah, tetapi dengan pengakuan ketidakmampuan pemerintah. Perlu juga diangkat isu-isu terkait liberalisasi perdagangan di negara-negara terjepit di Indonesia.

Kebijakan luar negeri pemerintahan SBY sebenarnya mendapatkan hal yang positif dari dunia internasional. SBY dinilai sudah sejalan dengan keinginan negara-negara tersebut. Hubungan militer Indonesia dengan Amerika

Serikat telah berhasil dijalin kembali. Sekjen PBB memuji Indonesia karena menerapkan demokrasi dan menghormati HAM. Pun upaya pemberantasan terorisme diapresiasi oleh Australia.

Terdapat tiga aspek yang menjadi konsen pemerintahan SBY. Upaya berkelanjutan untuk melindungi warga negara, khususnya TKI, dari waktu ke waktu. Mempromosikan tujuan dan visi Indonesia di agenda internasional sesuai dengan fakta. Terakhir, memfokuskan pada aspirasi rakyat dalam kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri yang realistis dan pragmatis sangat dibutuhkan.

Pada saat yang sama, Kementerian Luar Negeri sebagai otoritas pusat yang membidangi urusan luar negeri perlu memainkan peran terbesarnya dalam tiga aspek. Salah satunya adalah berkoordinasi dengan berbagai departemen terkait luar negeri dan tidak terlalu banyak mencampuri substansi. Kedua, membangun citra Indonesia pasca krisis dengan mengekspos negara dalam masa transisi. Ketiga, berperan lebih besar dalam perumusan kebijakan luar negeri.

Era/Periode	Faktor-faktor yang mempengaruhi			Pelaksanaan POLUGRI
	Kondisi Domestik, Politik dan Hukum	Kemampuan Ekonomi	Lingkungan Internasional	
Soesilo Bambang Yudhiono (2004-2009)	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya pelanggaran HAM - isu-isu terorisme - masih lemahnya penanganan kasus TKI - pelaksanaan PEMILU yang sukses. - penanganan serius atas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) - Kasus Bank Century 	<ul style="list-style-type: none"> - ekonomi mulai menguat - pertumbuhan GDP yang masih positif di masa krisis global. - berkurangnya angka kemiskinan (BPS) 	<ul style="list-style-type: none"> - krisis ekonomi global yang masih berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi - SBY dianggap sebagai salah tokoh berpengaruh di dunia (TIME) 	<ul style="list-style-type: none"> - Polugri Indonesia mendapat apresiasi Sekjen PBB. - adanya upaya untuk mengemnalikan plugri kepada khittah-nya, bebas aktif. - Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB - upaya membuat positive image building kepada dunia internasional pasca krisis ekonomi dan cap teroris

KESIMPULAN

Realitas kontemporer akibat proses demokratisasi menunjukkan bahwa pusat-pusat kekuasaan telah mengalami pluralisasi. Akibatnya, beberapa proses penentuan keputusan mengalami perubahan, di dalamnya bidang politik luar negeri. Kementerian Luar Negeri harus menyadari bahwa hal tersebut bukan satu-satunya alat diplomasi. Hal ini karena input kebijakan sangat beragam dalam konten dan asal.

Pada saat bersamaan, para aktor politik domestik harus mengetahui bahwa politik luar negeri pada setiap kebijakan juga menjadi penting, dan mencermati maksud dan arah yang diharapkan negara lain atas dari negaranya sendiri dalam konteks regional atau global.

Indonesia telah berulang kali aktif dalam upaya menengahi konflik di Asia Tenggara di tingkat ASEAN. Indonesia berperan membantu mencari solusi damai atas isu Kepulauan Spratly di Laut China Selatan, isu yang dijembatani oleh negara-negara ASEAN dan non-ASEAN, konflik di Kamboja, dan isu keamanan di Filipina.

Dengan Indonesia mengajukan konsep ASEAN Security Community (ASC) peran tradisional ini muncul kembali. Tidak diragukan bahwa usulan ASC berasal dari Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa polugri Indonesia mencerminkan dinamika politik dalam negeri ke arah yang lebih baik. Diplomasi "first-liner" pertahanan negara di masa damai dicerminkan pada masyarakat demokratis yang mana penyelesaian konflik secara damai selalu menjadi pilihan utama. ASC.

Indonesia yang memprakarsai ASC, bertujuan untuk memformulasikan masyarakat Asia Tenggara untuk tidak menggunakan kekerasan atau alat militer dalam penyelesaian konflik. Oleh sebab itu, jika Indonesia kurang konsisten mengikuti jalan damai untuk menyelesaikan masalah Aceh, bukan mustahil Indonesia terjerumus pada praktik "standar ganda" yang selalu mendorong penyelesaian damai atas masalah yang dihadapi negara tetangga, tetapi menggunakan kekerasan dalam menghadapi masalah. Praktik standar ganda inilah yang meninggalkan citra buruk di luar negeri.

Penolakan Indonesia untuk mengambil tindakan sepihak atas masalah Irak telah menjadi preseden yang baik. Sikap Indonesia di forum internasional sejalan dengan penolakan perang oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Kemlu melalui diplomasi publiknya aktif mempromosikan kampanye anti perang dengan tokoh masyarakat-tokoh agama, serta memilih *multilateralism principle*. Fenomena Irak, masyarakat melihat bahwa public opini semakin menjadi bagian tak terpisahkan dari polugri RI.

Memproyeksikan citra demokrasi di eksternal dapat memberikan kontribusi yang baik bagi tahapan demokrasi di dalam negeri. Oleh sebab itu, membangun kawasan Asia Tenggara harus menjadi *goals* politik luar negeri Indonesia. Demokrasi di Asia Tenggara juga mempengaruhi domestic Indonesia. Jika di era orde baru, sebagian besar anggota ASEAN membentuk pemerintahan tertutup karena pemimpin otoriter yang sepemikiran (kepemimpinan Suharto), momentum untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Poliheuristic Theory and Indonesia's Absence in Deep-Sea Mining (DSM), *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 2021, Department of IR, Faculty of Humanities, Binus University, Indonesia, 2021, Vol. 40(3) 461-483, DOI: 10.1177/18681034211036711
- 2G. Lenczowski, *American Presidents and the Middle East*, Duke University Press, Durham, 1990, hal. 9.
- Philippe C. Schmitter, "The international context of contemporary democratization", *Stanford Journal for International Affairs*, no.2 (1993), hal. 6.
- Fatma Zeynep, *European Union Democracy Promotion via Conditionality in Regional Context*, 2017, DOI: <http://dx.doi.org/10.17336/igusbd.324178>
<https://kemlu.go.id/portal/id/page/20/kerja-sama-regional>
- A.A, Perwita. & Y.M, Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, hal. 57-58
- Patrick Morgan, *International Relations and Politics*, <https://doi.org/10.1177/0002716284472001017>
- Anwar, D. F. (1998). *The Habibie Presidency*. Dalam G. Forrester, *Post Suharto Indonesia: Removal or Chaos?* (hal. 5). Bathurst: Crawford House Publishing.
<https://ham.go.id/download/uu-no-5-tahun-1998-tentang-konvensi-menentang-penyiksaan-dan-perlakuan-atau-penghukuman-lain-yang-kejam-tidak-manusiawi-atau-merendahkan-marabat-manusia/#:~:text=IKM-,UU%20No.%205%20Tahun%201998%20Tentang%20Konvensi%20Menentang%20Penyiksaan%20dan,Manusiawi%20atau%20Merendahkan%20Marabat%20Manusia>
- Adam Schwarz, *A nation in waiting* (Allen-Unwin: New South Wales, edisi kedua, 1999), hal. 374
- Lihat tulisan Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer, "East Timor - looking back on 1999", *Australian Journal of International Affairs*, vol.54.1 (2000), hal.3
- Richburg Keith, "Seven days in May that toppled a titan: back-room intrigue led to Suharto's fall" bisa dilihat di Aspinall, E., Van Klinken, G., Feith, H. (eds), "The last days of President Suharto" (Monash University: Monash Asia Institute, 1999), hal.71.
<http://www.tempointeraktif.com/share/?act=TmV3cw==&type=UHJpbnQ=&media=bmV3cw==&y=JEdMT0JBTFNbeV0=&m=JEdMT0JBTFNbbV0=&d=JEdMT0JBTFNbZf0=&id=zA1OA==>
- "Rekomendasi Komnas HAM: Jaksa Agung diminta menyidik Wiranto", <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2000/01/0202>
- <http://www.washingtonpost.com/wp-srv/WPlate/2000-01/15/0621-011500-idx.htm>
- "Military renews allegiance to government", *The Jakarta Post*, 21 January 2000.
<https://news.detik.com/berita/d-259152/akbar-amien-turun-panggung-gusdur-mega-mungkin-bertahan->

<https://www.antaranews.com/berita/167746/biografi-gus-dur>.

“UN chief applauds Indonesian inquiry”, *Washington Post*, 16 Februari 2000.
Bisa diakses di <http://www.washingtonpost.com/wp-srv/WPlate/2000-02/16/1131-021600-idx.html>

“Cina tidak mendukung separatisme di Indonesia”, *Republika* 1 Desember 1999; “Tahun 2010 ASEAN bebaskan bea masuk”, *Kompas* 28 November 1999.

Dalam siaran pers awal 2002an, Menlu Hasan Wirayuda menyebut hal itu sebagai faktor perantara. Kemlu pun melakukan penguatan fungsi diplomasi publik yang bertujuan untuk mempererat hubungan dengan bermacam sektor di domestic, termasuk akademisi, media, publik, dan LSM
